

## Analisis *FLYPAPER EFFECT* Pada Pengaruh PAD, DAU, dan DAK Terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur

**Firda Armatus Solicha**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [firda.21004@mhs.unesa.ac.id](mailto:firda.21004@mhs.unesa.ac.id)

**Nurul Hanifa**

S1 Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia  
Email: [nurulhanifa@unesa.ac.id](mailto:nurulhanifa@unesa.ac.id)

### Abstrak

*Flypaper effect muncul saat daerah bergantung terhadap dana dari pusat untuk mendukung pengeluaran daerah. Ketergantungan ini menimbulkan kekhawatiran terkait pelaksanaan otonomi daerah yang semakin meningkat. Penelitian ini menganalisis flypaper effect terkait pengaruh PAD, DAU, dan DAK pada belanja daerah Nusa Tenggara Timur tahun 2017-2023. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif serta teknik regresi data panel maka didapat hasil yakni PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan DAK tidak berpengaruh. Koefisien PAD memberikan pengaruh yang lebih signifikan dibandingkan DAU dan DAK, menunjukkan tidak adanya flypaper effect di Provinsi Nusa Tenggara Timur.*

**Kata Kunci :** *Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Daerah, dan Flypaper effect.*

### Abstract

*The flypaper effect arises when regions depend on funds from the center to support regional expenditures. This dependence raises concerns regarding the implementation of increasing regional autonomy. This study analyzes the flypaper effect related to the influence of PAD, DAU, and DAK on East Nusa Tenggara regional spending in 2017-2023. By using a quantitative approach and panel data regression techniques, the results obtained are PAD and DAU have a significant effect on regional spending, while DAK has no effect. The PAD coefficient has a more significant effect than DAU and DAK, indicating the absence of flypaper effect in East Nusa Tenggara Province.*

**Keywords :** *Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Regional Expenditure, and Flypaper effect*

## PENDAHULUAN

UU No. 32 Tahun 2004 merupakan tonggak penting dalam perjalanan Indonesia menuju desentralisasi daerah. Undang-undang ini menekankan pemisahan fungsi eksekutif dan legislatif dalam pemerintahan. Akan tetapi Undang - Undang tersebut digantikan dengan UU Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan kemandirian suatu daerah, mengoptimalkan layanan publik, serta mengawasi interaksi pemerintah pusat dengan daerah. Peran pemerintah pusat dalam pengelolaan fiskal diperkirakan akan mereduksi karena alokasi anggaran dilimpahkan ke pemerintah daerah, sedangkan porsi pemerintah daerah terhadap total pengeluaran pemerintah daerah diperkirakan akan meningkat secara tajam. Dimana, dana dialokasikan kepada pemerintah daerah melalui proses transfer dana yang mana sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat, dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal serta menjamin penyediaan layanan publik dengan kualitas tinggi (Sidik, 2002). Dalam penyediaan layanan publik melalui belanja daerah, anggaran daerah merupakan instrumen penting bagi pemerintah daerah. Dalam beberapa tahun terakhir, pagu dan realisasi belanja daerah untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur diilustrasikan sebagai berikut:

**Tabel 1. Belanja Daerah Provinsi NTT**

Tahun	Pagu	Realisasi	Presentase
2017	26.091,34	25.344,36	97%
2018	27.331,73	26.052,58	95%
2019	29.334,10	27.845,86	95%
2020	31.438,79	27.332,42	86%
2021	30.871,82	26.719,30	86%
2022	29.933,03	26.649,45	89%
2023	28.940,20	27.006,87	93%

**Sumber: Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (2023)**

Berdasarkan tabel 1, penurunan pagu anggaran dan persentase realisasi setelah tahun 2019 menggambarkan adanya tantangan fiskal atau perubahan prioritas kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi pandemi covid-19 atau kebijakan moneter sehingga hal tersebut berdampak pada perubahan efektivitas penggunaan anggaran. Terjadinya penurunan realisasi anggaran dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Banyak instansi pemerintah yang masih mendasarkan perencanaan anggaran pada kebutuhan, tanpa memperhitungkan elemen-elemen lain yang dapat mempengaruhi pelaksanaannya (Rianto & Wardana, 2020). Situasi ini didukung dengan fakta bahwa pemerintah daerah bergantung pada Dana Alokasi Umum guna mendanai pembangunan serta belanja daerah, sementara penggunaan sumber pendapatan daerah belum dimaksimalkan. Ketergantungan pada DAU tanpa mengoptimalkan potensi lokal menunjukkan kurangnya pengelolaan anggaran yang optimal, yang mana hal tersebut berdampak pada kemampuan daerah untuk melaksanakan proyek-proyek pembangunan secara efektif. Menurut Jensen & Meckling (1976) terdapat

perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal selama pelaksanaan kontrak kerja. Dimana pemerintah daerah cenderung menaikkan belanja daerahnya seiring dengan meningkatnya dana transfer.

Selain mendapatkan dana transfer, daerah juga dapat menghasilkan pendapatan dari pengelolaan lokal mengacu dengan hukum dan peraturan yang relevan. Menurut teori Peacock & Wiseman (1979), pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran ketika pendapatan pajak meningkat. Akibatnya, peningkatan pajak akan meningkatkan PAD, yang kemudian akan meningkatkan pengeluaran belanja daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 33 (2004) daerah dengan PAD yang lebih besar tidak terlalu mengandalkan dana transfer. Oleh sebab itu, kemampuan suatu daerah untuk berotonomi ditentukan oleh kewenangan dan kapasitasnya dalam mengembangkan sumber keuangan secara mandiri serta meminimalkan ketergantungan pada pemerintah pusat. Menurut Badan Pusat Statistik (2020), kemandirian fiskal adalah kondisi dimana suatu daerah dapat mendanai operasi pemerintah daerah, inisiatif pembangunan, dan penyediaan layanan kepada masyarakat.

**Tabel 1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi NTT**

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Ribu Rupiah)	Dana Perimbangan (Ribu Rupiah)	Rasio Kemandirian (Presentase)
2017	1.047.491.567	3.643.692.862	28%
2018	1.096.370.136	3.680.327.635	29%
2019	1.258.956.853	4.069.622.423	30%
2020	1.166.570.596	4.152.039.227	28%
2021	1.238.032.648	3.993.215.834	31%
2022	1.363.737.982	3.053.836.756	31%
2023	1.200.000.000	4.800.000.000	25%

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (2023)

Berdasarkan tabel 2. terlihat rasio kemandirian fiskal yang mencerminkan kontribusi PAD terhadap keseluruhan APBD yang masih berada di kisaran 0,281 sampai dengan 0,313. Artinya, PAD hanya mampu menutupi sekitar 28-31% dari total kebutuhan APBD, sedangkan sisanya tertutupi oleh dana perimbangan. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada pembayaran transfer untuk memenuhi kewajiban fiskalnya karena belum semampunya mandiri. Konsistensi persentase kemandirian selama tujuh tahun yang berkisar antara 25-31% memperkuat indikasi bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih rendah dan belum mengalami perubahan yang signifikan.

Penelitian sebelumnya oleh Melda & Syofyan (2020) menunjukkan DBH tidak berdampak pada belanja daerah, sedangkan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh. Di Sumatera Barat, terdapat flypaper effect. Penelitian lain oleh Nurul Ikhwan et al. (2019), menunjukkan jika DAU, DAK serta PAD berdampak terhadap pengeluaran daerah. Akan tetapi, berbeda dengan penelitian Astuti & Mildawati (2019) dimana DAK berdampak negatif terhadap Belanja Daerah karena metode pengalokasiannya tidak efektif dalam menilai kebutuhan khusus, sehingga perencanaan alokasi DAK menjadi tidak efisien. Selain itu, terdapat juga penelitian Dwi & Rianti (2020) menyatakan DAU serta PAD berdampak pada belanja daerah sedangkan DAK tidak berpengaruh. Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin merancang penelitian terkait, “Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Daerah di Nusa Tenggara Timur”. Penelitian ini ingin melihat apakah *flypaper effect* terjadi dikarenakan semakin banyaknya daerah yang mengandalkan transfer pusat tanpa mengoptimalkan pendapatan asli daerahnya.

## METODE PENELITIAN

Penelitian menerapkan metodologi kuantitatif, yaitu pendekatan berlandaskan filsafat positivisme (Sugiyono, 2016). Laporan APBD Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), merupakan salah satu sumber sekunder dari data yang digunakan dalam penelitian ini. Regresi data panel merupakan langkah selanjutnya setelah data lolos dari uji asumsi klasik.

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

Penjelasan:

Y	= Belanja Daerah
$\alpha$	= <i>Intercept</i>
X1	= Pendapatan Asli Daerah
X2	= Dana Alokasi Umum
X3	= Dana Alokasi Khusus
i dan t	= <i>Cross Section</i> dan <i>Time Series</i>
$\epsilon$	= <i>Error</i>

Dengan menggunakan persamaan (1), variabel-variabel yang digunakan diubah ke bentuk logaritma natural (Ln). Sugiyono (2020) menegaskan bahwa tujuan penggunaan transformasi tersebut adalah untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Berikut merupakan model persamaan yang telah ditransformasikan sesuai dengan pengujian:

$$BD\_Y_{it} = \alpha + \beta_1 \ln PAD_{it} + \beta_2 \ln DAU_{it} + \beta_3 \ln DAK_{it} \quad (2)$$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Uji Spesifikasi Model

Beberapa uji termasuk uji Chow, Hausman, dan *Lagrange Multiplier* (LM) diterapkan guna mengidentifikasi model terbaik. Berdasarkan hasil uji Chow menunjukkan nilai probability  $< 0,05$ , sehingga FEM merupakan model yang lebih unggul di antara CEM dan FEM. Hasil serupa diperoleh dari uji Hausman, di mana model terbaik antara FEM dan REM juga adalah FEM. Oleh karena itu, uji LM tidak perlu dilakukan, karena uji ini hanya diperlukan jika model terbaik yang dipilih adalah CEM atau REM.

### Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik dengan metode OLS tidak semuanya diterapkan sebab yang relevan hanya uji multikolinearitas serta heteroskedastisitas untuk diterapkan (Agus Widarjono, 2005). Menurut Gujarati & Porter (2011) data panel (*pooled data*) memiliki kelebihan seperti meminimalisir bias ketika menggabungkan individu atau perusahaan ke dalam sebuah kelompok yang luas. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa data terbebas dari multikolinearitas sebab nilai korelasi  $< 0,85$ .

**Tabel 3. Uji Multikolinieritas**

	Ln_PAD	Ln_DAU	Ln_DAK
Ln_PAD	1.000000	0.599671	0.294535
Ln_DAU	0.599671	1.000000	0.517856
Ln_DAK	0.294535	0.517856	1.000000

Sumber: diolah menggunakan E-Views 10 (2024)

Untuk setiap variabel, uji heteroskedastisitas metode Glejser menghasilkan nilai probabilitas di atas batas (0,05) maka masalah heteroskedastisitas tidak terdeteksi pada variabel-variabel penelitian. Dengan kata lain, model regresi memenuhi persyaratan homoskedastisitas karena distribusi kesalahan homogen dan tidak menunjukkan pola tertentu.

**Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0.195593	0.639251	-0.305972	0.7601
Ln_PAD	-0.020619	0.021620	-0.953712	0.3420
Ln_DAU	0.037507	0.102622	0.365490	0.7153
Ln_DAK	0.019053	0.018641	1.022132	0.3086

Sumber: diolah menggunakan E-Views 10 (2024)

## Hasil Analisis Regresi pada Data Panel

**Tabel 4. Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.894459	1.000599	4.891529	0.0000
Ln_PAD	0.111780	0.033841	3.303067	0.0012
Ln_DAU	0.154695	0.160631	0.963044	0.3373
Ln_DAK	0.102458	0.029178	3.511511	0.0006
R-squared	0.903656	Mean dependent var		6.855124
Adjusted R-squared	0.885731	S.D. dependent var		0.270903
S.E. of regression	0.091575	Akaike info criterion		-1.795775
Sum squared resid	1.081799	Schwarz criterion		-1.302763
Log likelihood	163.2747	Hannan-Quinn criter.		-1.595515
F-statistic	50.41453	Durbin-Watson stat		1.610129
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber: Data diolah menggunakan E-Views 10 (2024)

Variabel PAD dengan  $t_{hitung}$  3.303067 > dari  $t_{tabel}$  1.97838, dan probabilitas  $0.0012 < 0.05$ , sesuai dengan hasil analisis regresi data panel, maka disimpulkan belanja daerah dipengaruhi oleh PAD. Sebaliknya, variabel DAU memiliki nilai probabilitas sebesar  $0.3373 > 0.05$  dan nilai  $t_{hitung}$   $0.963044 < t_{tabel}$  1.97838 maka belanja daerah tidak dipengaruhi oleh DAU. Selain itu, variabel DAK memiliki nilai probabilitas  $0.0006 < 0.05$ , dan nilai  $t_{hitung}$   $3.511511 > t_{tabel}$  1.97838 sehingga DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Lebih lanjut, nilai  $F_{hitung}$   $50,41453 > F_{tabel}$  2,67538, sesuai dengan uji signifikansi simultan dimana nilai probability  $0,0000 <$  dari  $0,05$ . Oleh karena itu, variabel dependen dipengaruhi secara signifikan oleh variabel independen secara simultan.

### Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Nilai *R-squared* yang diperoleh dari hasil pengujian adalah sebesar 0,9036 atau 90,36%. Hal ini menunjukkan bahwa 90,36% variasi variabel Belanja Daerah dapat dijelaskan oleh variabel independen (PAD, DAU, dan DAK). Dengan sisa nilai *R-squared* 9,63% yang berkontribusi dari komponen lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

### Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah

Berdasarkan pengujian, belanja daerah Nusa Tenggara Timur selama periode 2017-2023 dipengaruhi secara signifikan oleh PAD. Akibatnya, peningkatan PAD berdampak pada peningkatan belanja daerah sehingga menunjukkan korelasi positif antara kedua variabel tersebut. Hasil ini didukung teori Peacock & Wiseman, dimana pemerintah cenderung meningkatkan pengeluaran ketika pendapatan pajak meningkat. Peningkatan pendapatan pajak menyebabkan peningkatan pengeluaran pemerintah. Teori ini menyatakan bahwa penerimaan pajak yang merupakan komponen dari PAD, memiliki hubungan yang erat dengan pembiayaan APBN, dimana pengeluaran daerah dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pajak.

Sejalan dengan penelitian Anam et al., (2022), Ramadhani et al., (2022), Fatimah et al., (2020), Dwi & Rianti, (2020) dimana PAD memiliki pengaruh terhadap belanja daerah, namun Safaah et al., (2022) menyatakan PAD tidak berdampak pada belanja daerah. Perbandingan PAD antar instansi NTT disebabkan oleh faktor-faktor yang saling terkait, salah satu faktor utama adalah potensi ekonomi daerah yang berbeda-beda. Penelitian oleh Valentino & Juwita (2023) menunjukkan bahwa sektor-sektor unggulan di suatu daerah, seperti pertanian, perdagangan, dan jasa, berkontribusi signifikan terhadap penerimaan PAD. Sektor-sektor ini berfungsi sebagai basis ekonomi yang mendukung peningkatan pendapatan. Oleh sebab itu, wilayah yang memiliki sektor ekonomi yang lebih kuat memiliki kecenderungan dalam penerimaan PAD yang tinggi.

### **Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah**

Mengacu pada hasil uji DAU tidak mempunyai pengaruh signifikan pada belanja daerah, maka dapat disimpulkan, bahwa setiap kenaikan DAU tidak mempengaruhi peningkatan belanja daerah begitu pula sebaliknya, penurunan DAU tidak menjadi penyebab penurunan Belanja Daerah. Belanja Daerah justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun, meskipun terjadi peningkatan alokasi DAU terbukti dari fenomena yang terjadi pada tahun 2017 hingga 2023, sehingga menunjukkan bahwasanya belanja daerah di nusa tenggara timur tidak dipengaruhi DAU. Didukung oleh Sherlinda et al., (2019), Fitriani & Budi Hendaris (2023), Sofiyani & Subadriyah (2020), menunjukkan DAU tidak berdampak pada hadap Belanja Daerah tetapi Septriani (2023) menemukan jika DAU memiliki pengaruh pada Belanja Daerah.

Umumnya meskipun DAU berfungsi sebagai sumber pembiayaan, efektivitasnya tidak menjamin dalam meningkatkan belanja daerah di NTT. Secara keseluruhan, meskipun DAU memiliki kemampuan untuk mempengaruhi belanja daerah, kinerjanya sangat bergantung pada konteks lokal dan bagaimana pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya. Menurut data realisasi DAU di NTT selama periode 2017-2023 DAU terjadi penurunan mulai 2017 ke tahun-tahun berikutnya dimana terjadi fluktuasi pada tahun-tahun tertentu dan mengalami kenaikan lagi pada 2023 meskipun tidak setinggi tahun 2017. Hal ini menyebabkan DAU tidak menunjukkan dampak yang signifikan kepada belanja daerah selama periode penelitian. Dengan demikian, pertumbuhan belanja daerah di Provinsi NTT sebagian besar didorong dengan peningkatan PAD.

### **Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

Berdasarkan hasil pengujian DAK memiliki pengaruh terhadap belanja daerah Nusa Tenggara Timur. Setiap kenaikan DAK mendorong kenaikan belanja daerah begitupun sebaliknya, penurunan DAK akan menyebabkan penurunan Belanja di daerah. Dana ini ditujukan ke suatu daerah guna membantu daerah memenuhi kebutuhan infrastruktur dasar yang selaras dengan prioritas nasional, termasuk pendidikan, kesehatan, transportasi, irigasi, air bersih, sanitasi, fasilitas pemerintah, pengembangan kelautan dan perikanan, pertanian, dan lain-lain. Hasil ini selaras dengan Teori Keagenan dimana pemerintah pusat berupaya memastikan penggunaan dana secara optimal, sedangkan pemerintah daerah bertujuan untuk

peningkatan layanan publik serta kesejahteraan masyarakat sehingga pemerintah daerah cenderung menaikkan belanja daerahnya seiring dengan meningkatnya dana transfer.

Temuan dari penelitian ini didukung dengan penelitian Melda & Syofyan (2020), Anam et al., (2022), Rafi & Arza (2023), dan Rahmatillah et al., (2023) menyatakan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Akan tetapi, Fatimah et al., (2020) menunjukkan DAK tidak memiliki dampak signifikan pada Belanja Daerah. DAK umumnya dialokasikan untuk membangun infrastruktur publik misalnya transportasi, layanan kesehatan, pendidikan, dan layanan lokal, dan DAK secara langsung terkait dengan belanja barang dan jasa. Ketika suatu daerah menerima jumlah dana yang lebih besar maka belanja barang serta jasa akan meningkat, sehingga meningkatkan konsumsi daerah secara keseluruhan.

### **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah**

PAD, DAU, dan DAK secara bersama-sama mempengaruhi belanja daerah Nusa Tenggara Timur periode 2017-2023, sesuai dengan hasil pengujian hipotesis. Akibatnya, setiap kenaikan PAD, DAU, dan DAK menghasilkan kenaikan belanja yang lebih tinggi. Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 Tahun 2019, penyaluran transfer dari pusat memiliki peran yang signifikan untuk mengoptimalkan layanan publik serta kinerja suatu daerah dan juga meskipun daerah tersebut mempunyai sumber penerimaan daerah yang tinggi akan tetap membutuhkan dana transfer untuk menutupi belanja daerah. Terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi, seperti kebutuhan untuk membiayai infrastruktur dan pelayanan publik serta disparitas kapasitas fiskal antar daerah.

Temuan ini sejalan dengan Anam et al., (2022) yang mengindikasikan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Melda & Syofyan (2020) menunjukkan bahwa PAD, DAU, dan DAK secara signifikan berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Selain itu, Rafi dan Arza (2023) di Provinsi Sumatera mengindikasikan bahwa PAD, DAU, dan DAK berdampak terhadap belanja daerah.

### **Analisis fenomena *flypaper effect* dari besarnya pengaruh DAU dan DAK dibandingkan dengan pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah**

Pengujian yang membandingkan koefisien PAD dengan koefisien DAU dan DAK mengindikasikan bahwa DAU tidak mempengaruhi belanja daerah. Sebaliknya, DAK berpengaruh namun dengan koefisien yang kecil daripada koefisien PAD maka *flypaper effect* tidak ditemukan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Dwi & Rianti (2020), Octaviana (2021)), Firdayanti & Hidayat, (2019), dan Allya & Rahmawati (2023) bahwa tidak adanya *flypaper effect* pada belanja daerah. Temuan penelitian ini dikuatkan oleh Pentury (2011) yang mengindikasikan bahwa *flypaper effect* tidak ada ketika koefisien PAD melebihi koefisien DAU. Ketika kontribusi PAD terhadap belanja daerah melebihi kontribusi DAU, pemerintah daerah menunjukkan ketergantungan yang lebih besar terhadap sumber pendapatannya sendiri, yang mengindikasikan berkurangnya



ketergantungan terhadap transfer dari pusat. Penelitian berbeda oleh Fadilah & Helmayunita (2020) menyimpulkan bahwa terdapat *flypaper effect* di belanja suatu daerah.

Temuan ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak mengalami fenomena *flypaper effect* selama ini. Sebaliknya, terdapat potensi pergeseran ke arah model pengelolaan fiskal yang lebih otonom dengan PAD yang berperan utama dalam memandu keputusan pengeluaran daerah. Langkah-langkah strategis sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan, termasuk optimalisasi DAU dan peningkatan PAD. Namun, hasil penelitian ini juga menjadi pengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah yang lebih terencana dan akuntabel masih diperlukan.

## KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tahun 2017 -2023 PAD serta DAK berdampak terhadap belanja daerah di Nusa Tenggara Timur, akan tetapi DAU menunjukkan sebaliknya yaitu tidak berdampak signifikan. Secara simultan PAD, DAU, dan DAK berpengaruh terhadap Belanja Daerah serta tidak ditemukan *Flypaper effect*. Bagi pengelola daerah, perlu adanya pengelolaan DAU secara efektif untuk mendukung proyek pembangunan, memaksimalkan potensi PAD melalui pengembangan industri lokal, serta mengoptimalkan penggunaan DAK untuk proyek prioritas seperti infrastruktur dan layanan publik. Bagi peneliti selanjutnya, penggunaan data lebih luas dengan jangka waktu penelitian yang lebih lama disarankan dan menggabungkan metodologi kualitatif, seperti wawancara dengan para pembuat kebijakan, untuk meningkatkan hasil kuantitatif.

## REFERENSI

- Agus Widarjono. (2005). *Ekometrika: Teori Dan Aplikasi Untuk Ekonomi Dan Bisnis* (1st ed.). EKONISIA.
- Allya, H. R., & Rahmawati, F. (2023). Flypaper Effect Pada Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 235–249. DOI: <http://dx.doi.org/10.35906/jep.v9i1.1493>
- Anam, H., Yunus, S., Sading, Y., Permana, D., & Tope, P. (2022). An Analysis of Flypaper Effect Phenomenon on Regional Expenditure in District and City in Central Sulawesi. *Proceedings of the 2021 Tadulako's International Conference on Social Sciences (TICoSS 2021)*, 674. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220707.006>

- Astuti, L. D., & Mildawati, T. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(10).
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Timur 2020*.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2021). *Kebijakan Dana Alokasi Umum*.
- Dwi, I., & Rianti, A. (2020). Pengaruh Flypaper Effect Pada PAD, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–22.
- Fadilah, H., & Helmayunita, N. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Di Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(3), 2656–3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/27>
- Fatimah, N. N., Nopiyanti, A., & Mintoyuwono, D. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah. *EQUITY*, 22(2), 197–214. <https://doi.org/10.34209/equ.v22i2.936>
- Firdayanti, F., & Hidayat, M. T. (2019). Pengaruh Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kota Surabaya (Studi Kasus Periode 2011-2017). *JEA17: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 4(1), 49–65.
- Fitriani, Y., & Budi Hendaris, R. (2023). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020). *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(1). [www.jabar.antaranews.com](http://www.jabar.antaranews.com),2021
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2011). *Basic Econometric* (5th ed., Vol. 5). McGraw Hill.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360.

- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)*. Portal DJPK. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Data Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD)*. Portal DJPK. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/tkdd>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019*. [www.jdih.kemenkeu.go.id](http://www.jdih.kemenkeu.go.id)
- Melda, H., & Syofyan, E. (2020). Analisis Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(2), 2656–3649. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/issue/view/24>
- Nurul Ikhwan, Naz'aina, & Ratna. (2019). Flypaper Effect Pada Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten Kota Di Provinsi Aceh Pada 2013-2018. *Jurnal Manajemen Indonesia (J-MIND)*, 4(2), 111–123.
- Octaviana, V. (2021). Flypaper Effect Dana Alokasi Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 22(4), 43–55.
- Peacock, A. T., & Wiseman, J. (1979). Approaches To the Analysis of Government Expenditure Growth. *Public Finance Review*, 7(1), 3–23.
- Rafi, R. N., & Arza, F. I. (2023). Analisis Flypaper Effect pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) terhadap Belanja Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 411–427. <https://doi.org/10.24036/jea.v5i1.649>
- Ramadhani, R., Nisa, F., Albab, U., Danil, A., & Br, M. (2022). Does Flypaper Effect Really Exist? Evidence From Government Budget In East Indonesia. *International Journal of Business*, 4(2).
- Rianto, R., & Wardana, A. K. (2020). Sistem Pendukung Keputusan Prioritas Anggaran Belanja Desa dengan Metode ANP-TOPSIS. *Conference*

*SENATIK STT Adisutjipto Yogyakarta*, 6.  
<https://doi.org/10.28989/senatik.v6i0.412>

Safaah, N., Syani, Z., Aprilianto, F., & Anwar, S. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *EKOMA : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 1(2), 60–74.

Septriani, S. (2023). Does the Flypaper Effect Phenomenon Occur on the Financial Performance of Provincial Governments in Indonesia? *JOURNAL OF ECONOMICS, FINANCE AND MANAGEMENT STUDIES*, 06(12). <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i12-41>

Sherlinda Ardanareswari, Lorentino Togar Laut, & Rian Destiningsih. (2019). Fenomena flypaper effect pada PAD, DAU dan DBH serta Pengaruhnya terhadap belanja daerah di pulau jawa tahun 2013-2017. *DINAMIC : Directory Journal of Economic*, 1(4), 360–494. <https://doi.org/10.31002/dinamic.v1i4.809>

Sidik, M. (2002). *Dana alokasi umum : konsep, hambatan, dan prospek di era otonomi daerah* (2nd ed.). Buku Kompas.

Sofiyani, L., & Subadriyah. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 4, 33–37. <http://ejournal.unisnu.ac.id/jra/>

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 33. (2004). *Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40770/uu-no-33-tahun-2004>

Valentino, G. I. A. K. A., & Juwita, A. H. (2023). Analisis potensi ekonomi dan pengaruhnya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). *Region : Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 18(2), 568. <https://doi.org/10.20961/region.v18i2.64555>